

Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penurunan *Accounting Fraud* Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kabupaten Sragen

Ardika Yuda Pamungkas¹⁾, Heppy Purbasari²⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200210435@student.ums.ac.id¹⁾, heppy.purbasari@ums.ac.id²⁾

ABSTRACT

Accounting fraud is a form of deviation from standard operating practices in an agency related to financial reporting. Internal control systems, compliance with accounting rules, and human resource competencies play a role in reducing accounting fraud. This study aims to analyze the effect of internal control systems, compliance with accounting rules, and human resource competencies on reducing accounting fraud in Activity Management Units (UPK) in Sragen Regency. The population in this study were UPK administrators in Sragen Regency. The sample determination used purposive sampling. The respondents of the study were 48 UPK administrators consisting of the chairman, secretary, Verification Team (TV), Supervisory Board (BP) and treasurer in UPK in each sub-district in Sragen Regency. The data obtained were then processed using multiple regression analysis. The results of this study include: first, the internal control system variable does not have a significant effect on the variable of reducing accounting fraud in UPK in Sragen Regency. Second, the variable of compliance with accounting rules does not have a significant effect on reducing accounting fraud in UPK in Sragen Regency. Third, the variable of human resource competency has a significant effect on reducing accounting fraud in UPK in Sragen Regency. This study can be utilized by the Central Government and Regional Governments to formulate policies related to reducing accounting fraud in UPK throughout Indonesia or specifically in UPK in Sragen Regency.

Keywords: *accounting fraud, internal audit unit, accounting rule compliance, human resource competence*

ABSTRAK

Accounting fraud merupakan bentuk penyimpangan dari praktik operasi standar pada suatu instansi yang terkait dengan laporan keuangan. Sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki peran dalam penurunan *accounting fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penurunan *accounting fraud* pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kabupaten Sragen. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus UPK di Kabupaten Sragen. Adapun penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Responden Penelitian sebanyak 48 pengurus UPK yang terdiri dari ketua, sekretaris, Tim Verivikasi (TV), Badan Pengawas (BP) dan bendahara di UPK setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini antara lain: pertama, variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen. Kedua, variabel ketaatan

aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen. Ketiga, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen. Kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penurunan *accounting fraud* pada UPK di seluruh Indonesia atau khususnya pada UPK di Kabupaten Sragen.

Kata Kunci: *accounting fraud*, satuan pengawas internal, ketaatan aturan akuntansi, kompetensi.

PENDAHULUAN

Kasus *fraud* saat ini semakin banyak terjadi di berbagai entitas ekonomi (Hairani et al, 2024). *Fraud* juga dikenal dengan kecurangan yang merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu, memanipulasi, atau menyembunyikan kebenaran guna mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain (ACFE, 2019), baik dalam konteks keuangan, bisnis, maupun kegiatan lainnya. Meskipun sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi dari *fraud*, dari berbagai penelitian dengan topik tentang *fraud* telah memberikan dampak yang luas bagi organisasi di seluruh dunia (Sidabutar, et al., 2024). Adapun skema *fraud* yang terkenal di Indonesia meliputi: korupsi, penyalahgunaan aset, dan rekayasa laporan keuangan (ACFE, 2019). Tindakan *fraud* ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi atau badan yang dapat dilakukan oleh orang dalam atau orang luar organisasi (Sari, et al. 2020). *Fraud* juga mengakibatkan kerugian ekonomi bagi organisasi, baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintah (Fadhilah, 2021).

Dalam ranah akuntansi, *fraud* merujuk pada penyimpangan dari praktik operasi standar yang berdampak pada laporan keuangan, seperti pemalsuan fakta, manipulasi data, pencatatan fiktif, penghilangan dokumen, serta *mark-up* demi keuntungan finansial ilegal (Kurniawan, 2021). Di Indonesia, kasus *fraud* paling sering terdeteksi melalui laporan keuangan (38,9%) dan audit internal (23,4%), dengan jenis *fraud* paling merugikan mencakup korupsi (69,9%), penyalahgunaan aset (20,9%), dan *fraud* laporan keuangan (9,2%) (ACFE, 2019). Pemerintah menjadi pihak yang paling banyak dirugikan akibat *fraud* (48,5%), melebihi BUMN (31,8%) dan sektor swasta (15,1%). Padahal, sebagai pengelola dana publik, pemerintah dituntut menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yakni keterbukaan atas informasi keuangan yang akurat dan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran (Judijanto et al., 2024; Jubaedah, 2011; Rosidah et al., 2023). Fakta tingginya kerugian akibat *fraud* menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, teratur, dan sesuai aturan, seperti yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang mengedepankan asas akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan pemeriksaan independen. Pengelolaan anggaran sektor publik menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan, sebagaimana dicontohkan dalam

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang menekankan pertanggungjawaban penggunaan dana publik (Mardiasmo, 2009).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang sekarang menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan. DAPM merupakan Program lanjutan untuk mengelola aset berupa dana bergulir di masyarakat sebagai warisan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun program dari DAPM tersebut berupa Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Usaha Ekonomi Produktif, dan program bantuan berupa pembagian sembako gratis, program pembangunan rumah tidak layak huni, dan pembuatan jamban disetiap desa (Rohmah, 2012). Menurut Pratiwi et al., (2023) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) mulai dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di wilayah-wilayah pedesaan. Pinjaman dana bergulir tersebut dikelola oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Perdesaan dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Perkotaan yang kemudian disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang optimal, tercermin dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di sejumlah daerah. Misalnya, pada tahun 2023 terungkap korupsi sebesar Rp1,92 miliar di Swadana Harta Lestari, Kediri, Tabanan; kasus lain di Lombok Timur melibatkan pengelolaan DAPM sebesar Rp1 miliar pada periode 2017–2021; Kecamatan Gerih, Ngawi mengalami kerugian Rp647 juta; serta kerugian negara sebesar Rp2,8 miliar di Kecamatan Padang Bolak Julu, Padang Lawas Utara untuk periode 2016–2020. Menurut Kuntadi et al. (2022), salah satu penyebab utama *fraud* adalah lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya dalam aspek *monitoring*, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu memastikan pengawasan berjalan efektif. Miranda (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal yang kuat, ditopang oleh sumber daya manusia dan teknologi, mampu mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap aturan akuntansi juga memicu *fraud*, karena laporan keuangan yang disusun tanpa mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) rawan manipulasi aset dan informasi, yang pada akhirnya menciptakan tindakan tidak etis (Wolk et al., 1997). Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan akuntansi menjadi kunci dalam mencegah *fraud* dalam pengelolaan DAPM.

Faktor ketiga yang memengaruhi terjadinya *fraud* adalah kompetensi sumber daya manusia, yang mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap, dan pengalaman dalam menjalankan tugas secara efektif (Kuntadi et al., 2022; Veithzal, 2003). Kompetensi individu menjadi modal dasar organisasi dalam mencapai tujuannya

(Mahyuddin, 2018) dan jika dikelola dengan baik, akan membentuk kapabilitas organisasi, yaitu kemampuan kolektif dalam mengoordinasikan sumber daya secara efisien (Ulrich & Lake, 1990). Beberapa penelitian mendukung pentingnya kompetensi ini dalam mencegah *fraud*. Ismuadi & Saputra (2016) menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* pada PNPM MPd di Aceh. Norsain (2014) menyimpulkan bahwa audit internal memadai dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*, namun perlu diperluas ke seluruh unit yang dikelola oleh BKM. Kuntadi et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi SDM, dan moralitas individu secara signifikan memengaruhi pencegahan *fraud*. Sementara itu, Febriani et al. (2023) menyatakan bahwa penguatan pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi berkontribusi dalam menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi di BPKAD Kabupaten Nganjuk.

Penelitian untuk menguji pengaruh pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku etis sebagai variabel moderating dilakukan oleh (Fadilah et al., 2021). Adapun hasil dari penelitian ini meliputi: pertama, pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kedua, Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketiga, perilaku etis memperkuat hubungan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Keempat, perilaku etis tidak memperkuat ataupun memperlemah hubungan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, pertama terkait penelitian yang menggunakan variabel sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan kecenderungan *fraud* serta kedua, penelitian yang menggunakan PNPM sebagai objeknya, penelitian ini akan mengembangkan dari kedua penelitian tersebut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Kuntadi et al., 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penambahan variabel ketaatan aturan akuntansi yang diambil dari penelitian Fadilah et al., (2021) sesuai dengan kebutuhan obyek penelitian pada UPK Kabupaten Sragen yang telah dilakukan *research* di UPK sragen. Perbedaan kedua terkait masalah waktu dan tempat penelitian untuk memperoleh bukti konsistensi hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil studi empiris pada UPK di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan hal tersebut, penulis meninjau literatur yang ada untuk menyelidiki unsur-unsur yang mempengaruhi penurunan kecenderungan kecurangan akuntansi. Karena masih berbagai ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya maka saya tertarik meneliti tentang penerapan sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kompetensi SDM terhadap penurunan kecenderungan *accounting fraud* pada UPK.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan melibatkan principal sebagai pemberi wewenang dan agen sebagai pelaksana tugas, di mana dalam konteks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), principal mencakup pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, sementara agen meliputi UPK, BKAD, dan fasilitator (Ross, 1973; Jamaluddin et al., 2023). *Agency theory* menyoroti potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan, di mana agen sering bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, rasionalitas terbatas, dan penghindaran risiko, yang dapat memicu asimetri informasi dan manipulasi laporan keuangan (Eisenhardt, 1989; Ferina et al., 2023). Dalam kerangka kontraktual, principal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tertentu, namun agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan principal karena dorongan untuk memaksimalkan utilitas pribadi (Jensen et al., 1976; Jamaluddin et al., 2023). Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk menganalisis potensi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), yang mencerminkan konflik antara pemerintah sebagai principal dan pengelola dana lokal sebagai agen. Pencegahan kecurangan akuntansi difokuskan pada penguatan pengendalian internal untuk membatasi perilaku oportunistik, peningkatan kepatuhan terhadap aturan akuntansi agar agen bertindak sesuai ekspektasi principal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat lokal guna memastikan pemahaman terhadap tanggung jawab dan peraturan yang berlaku.

UPK dan DAPM

Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) merupakan kelanjutan dari pengelolaan dana bergulir pasca berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada 2014, seiring penghapusan kelembagaan PNPM akibat diberlakukannya Undang-Undang Desa dan terbitnya SE Menko Kesra No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 (Indriani et al., 2020; Isdiyanto, 2022). UPK dibentuk oleh Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan berfungsi sebagai pengelola operasional kegiatan antar desa, khususnya dalam pengelolaan dana bergulir. Struktur organisasinya mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi pemberdayaan yang dipilih melalui MAD, serta dilengkapi dengan Badan Pengawas dan Tim Verifikasi. Ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur keuangan, persetujuan anggaran, dan verifikasi laporan keuangan; Sekretaris mengelola administrasi dan dokumen non-keuangan serta membantu penyusunan laporan keuangan; Bendahara mencatat dan mengelola transaksi keuangan serta memberikan pelatihan keuangan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK); Tim Verifikasi melakukan penilaian atas usulan kegiatan desa melalui observasi dan memberikan rekomendasi; sementara Badan Pengawas memastikan kepatuhan terhadap prinsip PNPM dan memantau pelaksanaan tugas pengurus. UPK juga menjalankan fungsi pembinaan, sosialisasi, evaluasi, penyusunan aturan, fasilitasi kerja sama, penguatan kelembagaan peminjam, pelatihan pelaku

program, serta mendorong transparansi dan penyelesaian masalah dari perencanaan hingga pelestarian program di tingkat desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penurunan *Accounting Fraud*

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Halimatusyadiah et al., 2021). Tujuan pengendalian *intern* menurut COSO yang dikutip Sawyer et al., (2005) adalah “Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian dalam efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Teori *diamond Fraud* Wolfe et al., (2004) menjelaskan ada empat hal yang mendorong terjadinya sebuah *fraud* atau kecurangan, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi) dan *capability* (kemampuan). Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan, Teori *diamond fraud*, Wolfe et al., (2004) menjelaskan adanya dorongan dan peluang seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang. Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang yang besar dalam suatu organisasi. Berdasarkan *diamond fraud* seseorang akan melakukan tindak kecurangan jika terdapat sebuah peluang, Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah maka seorang pimpinan atau orang yang diberikan wewenang memiliki peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Peluang yang besar membuat kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Kecurangan dapat terjadi apabila ada dorongan dari pengendalian internal untuk melakukan hal tersebut. Dorongan yang besar membuat kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Dorongan pengendalian internal tersebut dapat dikurangi dengan pengendalian internal yang baik.

Berdasarkan penelitian Kuntadi et al., (2022) menunjukkan jika pengendalian internal semakin baik dalam suatu instansi maka semakin sedikit kecurangan akuntansinya. Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, Penelitian Sari et al., (2020) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), Penelitian yang di lakukan oleh Fadhilah et al., (2021) menunjukkan bahwa Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di satu instansi pemerintahan dapat menekan atau mengurangi terjadinya tindak kecurangan. Dengan berdasarkan pada konsep dan hasil penelitian tersebut, peneliti akan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam hipotesa sebagai berikut:

H₁: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Penurunan *Accounting Fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen.

Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Penurunan *Accounting Fraud*

Aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan menurut informasi yang di dapat dari (Sari et al., 2020). Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Teori diamond *Fraud* oleh Wolfe et al., (2004) menjelaskan ada 4 hal yang mendorong terjadinya sebuah *fraud* atau kecurangan, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan). Pembuatan laporan keuangan dalam sebuah organisasi dan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah memberikan kesempatan atau peluang bagi seseorang dalam berbuat kecurangan akuntansi. Penerapan Standar akuntansi dibuat untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh organisasi guna memudahkan pengelolaan keuangan organisasi, namun penerapan standar akuntansi tidak lepas dari adanya risiko keamanan dan salah saji yang dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi

Aturan akuntansi dapat mencegah dan mengurangi kecurangan akuntansi, yang berarti bahwa semakin taat aturan akuntansi, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan, sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap peraturan rendah maka pegawai tersebut cenderung mengesampingkan peraturan yang berlaku dan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan dalam agen tersebut. Pandangan ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Adwitya et al., 2020)

Dengan didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhilah (2021) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap penurunan kecurangan akuntansi, Praktik kecurangan akan terjadi dalam suatu entitas jika seorang pegawai tidak mampu mentaati peraturan yang telah berlaku. (Sari et al., 2020) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Febriani et al., (2023) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi memberikan kontribusi terhadap penurunan *fraud*. Semakin mengikuti pedoman dan sesuai aturan akuntansi, maka semakin menurunkan kecurangan akuntansi. Dengan berdasarkan pada konsep dan hasil penelitian tersebut, peneliti akan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam hipotesa sebagai berikut:

H₂: Ketaatan Aturan Akuntansi Berpengaruh Positif terhadap Penurunan *Accounting Fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen

Pengaruh Kompeten Sumber Daya Manusia Terhadap Penurunan *Accounting Fraud*

Kompetensi adalah karakteristik bahwa individu memiliki kemampuan dan digunakan dengan cara yang konsisten sesuai untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Karakteristik ini meliputi pengetahuan, keterampilan, aspek citra diri,

motif sosial, sifat, pola pikir dan cara berpikir, perasaan, dan pelaksanaan (Dubois, 2004 dalam Kuntadi, et al., 2022). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas yaitu kemampuan seseorang individu dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi atau kewenangan untuk dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Sugiarti et al., 2017).

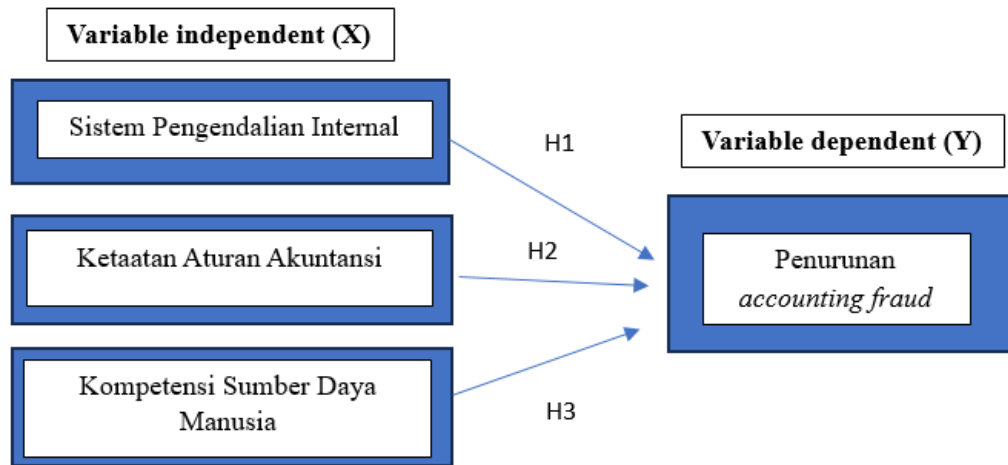
Peran keterampilan interpersonal memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan organisasi dalam upaya menciptakan keunggulan dan mencapai tujuan (Saputra et al., 2019). Kompetensi individu yang berkualitas didukung oleh latar belakang akademis, pelatihan dan pengalaman mereka dipengelolaan keuangan. Kemampuan individu diperlukan untuk memahami dan menerapkan logika akuntansi. Karena kurangnya kompetensi berdampak pada kesalahan dalam laporan keuangan yang disusun dan jika laporan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, akibatnya informasi yang diterima pengguna tidak benar.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Animah et al., (2020) menunjukkan bahwa Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Cris et al., (2022) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Cris et al., (2022) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Dengan berdasarkan pada konsep dan hasil penelitian tersebut, peneliti akan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam hipotesa sebagai berikut:

H₃: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Penurunan *Accounting Fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep sistem pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian internal dipandang sebagai upaya organisasi dalam memastikan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien melalui mekanisme kontrol yang memadai. Ketaatan terhadap aturan akuntansi mencerminkan kepatuhan organisasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akurat. Kompetensi sumber daya manusia mengacu pada kemampuan individu yang digunakan secara konsisten untuk mencapai kinerja optimal. Sementara itu, kecurangan akuntansi merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Keempat unsur tersebut saling berinteraksi dan membentuk dasar pemikiran dalam mengkaji hubungan antara pengendalian internal, kepatuhan akuntansi, dan kompetensi SDM terhadap potensi terjadinya kecurangan akuntansi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Penurunan <i>Accounting Fraud</i>	1) manipulasi, pemalsuan; 2) penghilangan peristiwa; 3) salah menerapkan prinsip akuntansi; 4) penyalahgunaan atau penggelapan; dan 5) perlakuan yang tidak semestinya terhadap asset	Wilopo (2006)
Sistem Pengendalian Internal	(1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi, (5) Pemantauan pengendalian internal	COSO (2013) dalam Karyadi (2019)
Ketaatan Aturan Akuntansi	(1) Tanggung jawab profesi, (2) Kepentingan publik, (3) Integritas, (4) Objektivitas, (5) Kehati-hatian, (6) Kerahasiaan, (7) Konsistensi, (8) Standar teknis	Adelin et al. (2013); Laoli (2022)
Kompetensi SDM	(1) Pengetahuan, (2) Keterampilan, (3) Sikap	Rusvianto et al. (2018)

Semua pernyataan diukur dengan menggunakan skala ordinal (Likert), 1 sampai 5. Jawaban yang diperoleh kemudian dibuatkan skor, yaitu: nilai 1 sangat tidak setuju; 2 tidak setuju; 3 netral; 4 setuju; dan 5 sangat setuju

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kabupaten Sragen yang bertujuan menguji hipotesis melalui analisis data numerik dari kuesioner. Populasi mencakup seluruh pengurus UPK, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling yang melibatkan ketua, sekretaris, tim verifikasi, badan pengawas, dan bendahara di tiap kecamatan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner guna mengukur variabel sistem

pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan kecurangan akuntansi, yang dioperasionalkan sesuai pendekatan kuantitatif berbasis prinsip positivisme. Uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson Product Moment menggunakan SPSS versi 27 pada taraf signifikansi 0,05, dan instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari r tabel. Reliabilitas diuji dengan Cronbach Alpha, dengan kriteria nilai lebih dari 0,60 untuk menunjukkan konsistensi jawaban responden. Sebelum analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov (data normal jika nilai Asymp. Sig. \geq 0,05), uji multikolinearitas melalui nilai VIF (<10) dan *tolerance* ($>0,1$), serta uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser (tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansi $> 0,05$). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel, dengan evaluasi model melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji F untuk menilai signifikansi model secara keseluruhan (model signifikan jika p-value $< 0,05$), dan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (signifikan jika p-value $< 0,05$), sesuai panduan dari Ghozali (2018), Sugiyono (2008; 2022), Arikunto (2002), dan Sudarmanto (2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen. Data dikumpulkan melalui kuesioner cetak yang dibagikan langsung kepada responden, terdiri dari tiga bagian: identitas responden, petunjuk pengisian, dan pertanyaan penelitian. Peneliti memberikan keleluasaan dalam pengisian identitas kecuali untuk jabatan, guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi responden dalam memberikan jawaban yang jujur, mengingat topik mengenai *fraud* dan kebijakan nasional tergolong sensitif. Kuesioner yang telah dikembalikan menjadi data primer dalam menganalisis karakteristik responden serta menguji secara empiris pengaruh variabel independen terhadap penurunan *fraud*. Bagian selanjutnya dalam bab ini akan memaparkan analisis deskriptif dan tahapan uji statistik yang mendukung pembuktian hipotesis penelitian.

Deskripsi Responden

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Karakteristiknya

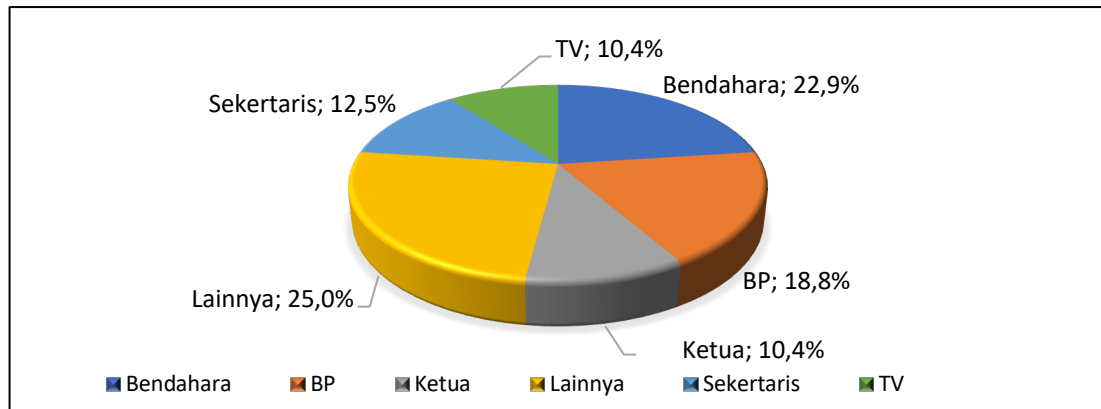
N Valid	48	48	48	48
Missing	0	0	0	0

(Sumber: Karakteristik Responden SPSS 27, diolah)

Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa jumlah responden pada setiap karakteristiknya memiliki jumlah yang sama yaitu sebanyak 48 responden.

pembahasan selanjutnya akan mendeskripsikan responden pada masing-masing karakteristik.

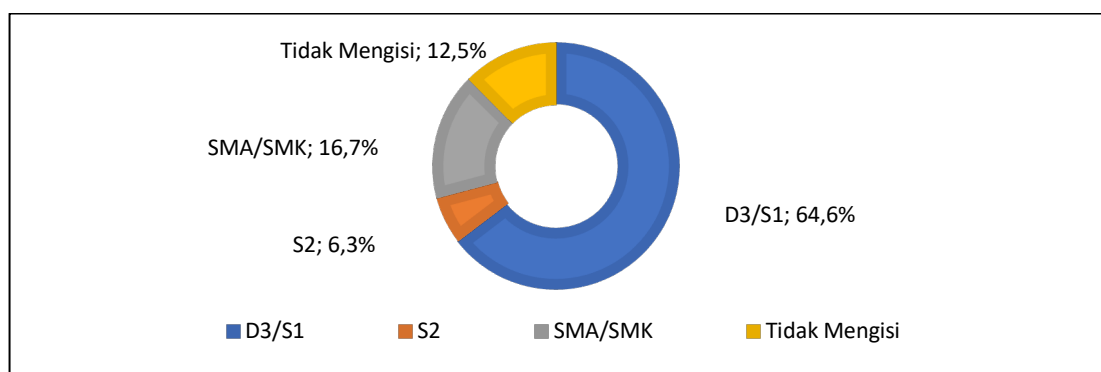
Responden Berdasarkan Jabatan



Gambar 1. Grafik Responden Berdasarkan Jabatan
(Sumber: Karakteristik Responden SPSS 27, diolah)

Berdasarkan analisis data yang disajikan grafik 1., responden pada penelitian ini dengan jabatan ketua pada UPK sebanyak 5 Orang (10,4%). Responden dengan jabatan sekretaris sebanyak 6 orang (12,5%). Responden dengan jabatan bendahara sebanyak 11 responden (22,9%). Responden yang menduduki jabatan Badan Pengawas (BP) sebanyak 9 responden (18,8%). Untuk Jabatan Tim Verifikasi (TV) diisi oleh 5 orang responden (10,4%). Jabatan Lainnya menjadi responden mayoritas dalam penelitian ini berjumlah 12 orang (25%). Jumlah responden yang tersebar berdasarkan pada jabatannya ini menunjukkan bahwa responden telah merepresentasikan jabatan pada UPK.

Berdasarkan Pendidikan Terakhir

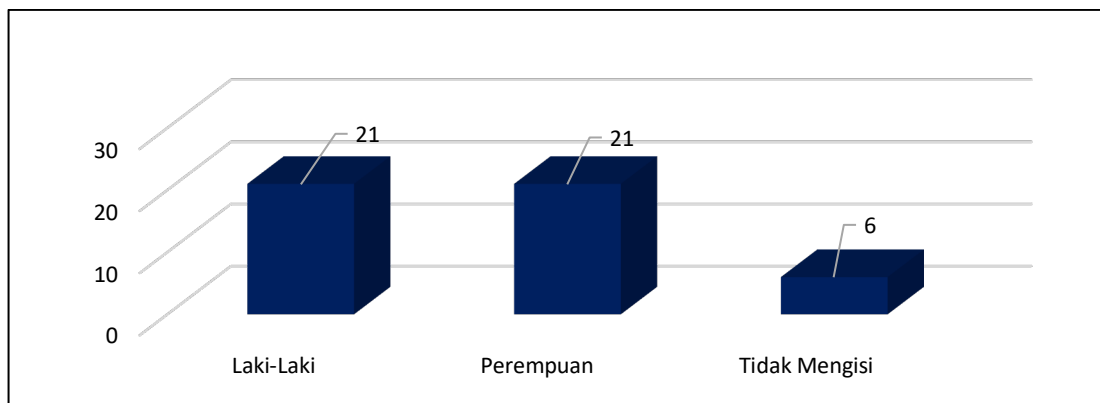


Gambar 2. Grafik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
(Sumber: Karakteristik Responden SPSS 27, diolah)

Berdasarkan Grafik 2, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan D3/S1 sebanyak 31 orang (64,6%), diikuti oleh lulusan SMA/SMK

sebanyak 8 orang (16,7%), dan responden dengan pendidikan S2 sebanyak 3 orang (6,3%). Sementara itu, terdapat 6 responden (12,5%) yang tidak mengisi data pendidikan pada kuesioner. Sebaran ini mencerminkan keberagaman tingkat pendidikan responden, yang relevan dalam memberikan perspektif komprehensif terhadap topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia dalam upaya pencegahan *fraud* akuntansi pada UPK di Kabupaten Sragen.

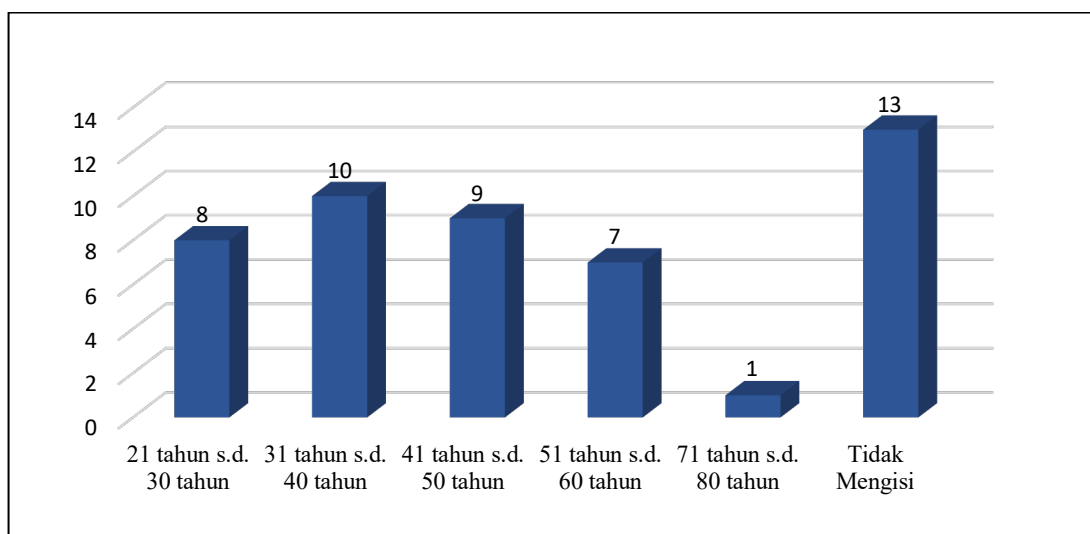
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3. Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber: Karakteristik Responden SPSS 27, diolah)

Grafik 3. menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini terdiri dari 21 orang responden laki-laki dan 21 orang responden Perempuan atau masing-masing 43,8%. Sisanya sebanyak 6 orang yang tidak memberikan informasi pada kuesioner penelitian.

Responden Berdasarkan Rentang Usia



Grafik 4. Responden Berdasarkan Rentang Usia

(Sumber: Karakteristik Responden SPSS 27, diolah)

Berdasarkan Grafik 4, sebaran usia responden menunjukkan variasi yang cukup luas, dengan rincian: usia 21–30 tahun sebanyak 8 orang (16,7%), 31–40 tahun sebanyak 10 orang (20,8%), 41–50 tahun sebanyak 9 orang (18,8%), 51–60 tahun sebanyak 7 orang (14,6%), dan 71–80 tahun sebanyak 1 orang (2,1%), sementara 13 responden (27,1%) tidak menginformasikan usianya. Jumlah tertinggi berasal dari responden yang tidak mencantumkan usia, sedangkan usia tertua tercatat pada rentang 71–80 tahun. Variasi ini mencerminkan bahwa data diperoleh dari berbagai kelompok usia, sehingga dapat merepresentasikan persepsi yang beragam terhadap pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan terhadap aturan akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penurunan *fraud* akuntansi pada UPK di Kabupaten Sragen.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen

No	Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (r_{hitung})	(r_{tabel})	Keterangan
1	Sistem Pengendalian Internal (X1)	X1.1	.692**	0,2845	Valid
		X1.2	.642**	0,2845	Valid
		X1.3	.639**	0,2845	Valid
		X1.4	.681**	0,2845	Valid
		X1.5	.765**	0,2845	Valid
		X1.6	.500**	0,2845	Valid
		X1.7	.649**	0,2845	Valid
		X1.8	.662**	0,2845	Valid
		X1.9	.666**	0,2845	Valid
2	Ketaatan Aturan Akuntansi (X2)	X2.1	.607**	0,2845	Valid
		X2.2	.665**	0,2845	Valid
		X2.3	.682**	0,2845	Valid
		X2.4	.434**	0,2845	Valid
		X2.5	.508**	0,2845	Valid
		X2.6	.589**	0,2845	Valid
3	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	X3.1	.595**	0,2845	Valid
		X3.2	.640**	0,2845	Valid
		X3.3	.649**	0,2845	Valid
		X3.4	.336*	0,2845	Valid
		X3.5	.714**	0,2845	Valid
		X3.6	.727**	0,2845	Valid
4		Y1.1	.647**	0,2845	Valid

No	Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (<i>r_{hitung}</i>)	(<i>r_{tabel}</i>)	Keterangan
	Penurunan Accounting Fraud (Y)	Y1.2	.595**	0,2845	Valid
		Y1.3	.811**	0,2845	Valid
		Y1.4	.696**	0,2845	Valid
		Y1.5	.749**	0,2845	Valid
		Y1.6	.732**	0,2845	Valid
		Y1.7	.740**	0,2845	Valid

(Sumber: *Output* uji validitas dengan SPSS versi 27, diolah)

Berdasarkan Tabel 3. di atas terlihat bahwa seluruh instrumen penelitian ini memperoleh validitas yang memenuhi ketentuan validitas instrumen yang dipersyaratkan. sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas instrumen.

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbac h's Alpha	Cronbach's Based On Standardized Items	N of Items
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.834	.834	9
Ketaatan Aturan Akuntansi (X2)	.604	.615	6
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	.635	.664	6
Penurunan Accounting fraud (Y)	.811	.839	7

(Sumber: *Output* uji normalitas dengan SPSS versi 27, diolah)

Berdasarkan Tabel 4. Di atas, hasil pengujian reliabilitas pada instrumen penelitian ini menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel lebih besar dari 0.06. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.884. Variabel ketaatan Aturan Akuntansi (X2) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0.604. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) memiliki *Cronbach's Alpha* 0.635. Variabel Penurunan *Accounting fraud* (Y) memiliki *Cronbach's Alpha* 0.811. Hasil uji reliabilitas terhadap keempat variabel tersebut lebih besar dari 0.06 sehingga instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel dan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji normalitas Data Penelitian

	Unstandardized Residual
N	46
Test Statistic	.128

Asymp. Sig. (2-tailed) .058

(Sumber: *Output* uji normalitas dengan SPSS versi 27, diolah)

Dari hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan penghapusan outlier dan dilakukan transformasi diperoleh nilai *Asymp. Sig (2- Tailed)* sebesar 0,058. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Constant	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.748	1.337
Ketaatan aturan Akuntansi (X2)	.783	1.277
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	.670	1.493

(Sumber: *Output* uji normalitas dengan SPSS versi 27, diolah)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 7, variabel sistem pengendalian internal (X1) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,748 dan VIF sebesar 1,337, variabel ketaatan aturan akuntansi (X2) memiliki nilai tolerance 0,783 dan VIF 1,277, serta variabel kompetensi sumber daya manusia (X3) dengan tolerance 0,670 dan VIF 1,493; seluruh nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada data penelitian tersebut.

Uji Heteroskedastitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	t	.Sig
Constant	-.310	.758
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.578	.566
Ketaatan aturan Akuntansi (X2)	.541	.591
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	-.028	.978

(Sumber: *Output* uji normalitas dengan SPSS versi 27, diolah)

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 8, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (p value atau Sig.), yaitu jika Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika Sig. < 0,05 terjadi heteroskedastisitas. Dari Tabel 6 terlihat bahwa variabel sistem pengendalian internal (X1) memiliki nilai Sig. 0,566, variabel ketaatan aturan akuntansi (X2) sebesar 0,591, dan variabel kompetensi sumber daya manusia (X3) sebesar 0,978, semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga residual data pada ketiga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya asumsi klasik ini, maka data penelitian layak digunakan untuk

pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji R (Koefisien Determinasi)

Tabel 8. Hasil Uji koefisien determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
.691	.478	.440	2.061

(Sumber: Output uji koefisien determinasi dengan SPSS versi 27, diolah)

Berdasarkan tabel 8. *output* SPSS di atas, diperoleh nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,440. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 44,0%, sedangkan sisanya sebesar 56,0% (1 – 0,560) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

	F	.Sig
Regression	12.799	<.001

(Sumber: *Output* uji F dengan SPSS versi 27, diolah)

Dari tabel 9. hasil output SPSS di atas, dapat diperoleh nilai sig. sebesar 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai variabel sistem pengendalian internal (X1), ketaatan aturan akuntansi (X2), dan kompetensi sumber daya manusia (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel penurunan *accounting fraud* (Y). Dengan demikian model dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji T (Pengujian Hipotesis)

Analisis regresi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui persamaan matematik, dengan pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel (Ghozali, 2018). Penentuan t-tabel pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung derajat kebebasan (dk) menggunakan rumus $dk = n - k$, di mana n adalah jumlah sampel dan k jumlah konstruk, sehingga diperoleh $dk = 46 - 2 = 44$; kemudian menetapkan taraf kesalahan 5% (0,05), menarik garis dk secara horizontal dan nilai taraf kesalahan secara vertikal, sehingga didapat t-tabel sebesar 2,01537 (Nuryadi et al., 2017). Keputusan uji t adalah menolak H_0 jika t-hitung > t-tabel atau p-value < 0,05, yang berarti ada pengaruh variabel independen terhadap dependen, dan menerima H_0 jika t-hitung < t-tabel atau p-value > 0,05, yang berarti tidak ada pengaruh. Hasil uji regresi dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi

	t	Sig
Constant	1.227	.227
Sistem Pengendalian Internal (X1)	1.902	.064
Ketaatan aturan Akuntansi (X2)	-1.366	.179
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	4.431	<.001

(Sumber: *Output* uji normalitas dengan SPSS versi 27, diolah)

Dari hasil output SPSS pada Tabel 10, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal (signifikansi $0,064 > 0,05$) dan ketaatan aturan akuntansi (signifikansi $0,179 > 0,05$) tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen, sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia (signifikansi $0,001 < 0,05$) memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud* di pada UPK di Kabupaten Sragen.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penurunan *Accounting Fraud*

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2020) dan Fadhilah et al., (2021). Hasil kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *accounting fraud*. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Kuntadi et al., (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang semakin baik dalam suatu instansi maka semakin sedikit terjadi *accounting fraud* pada instansi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ruhayat et al., (2024) yang mengukur pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *accounting fraud* pada pengelolaan dana desa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud*. Hal ini dikarenakan keberhasilan untuk mencegah *accounting fraud* tidak hanya bergantung pada sistem pengendalian internal melainkan juga bergantung pada kerja sama semua pihak yang terlibat penerapan sistem pengendalian internal tersebut. Walaupun suatu sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, namun tanpa kerjasama dari semua pihak dalam menjalankan pengendalian tersebut, maka sistem tersebut tidak akan efektif dalam mencegah terjadinya *accounting fraud*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan oleh Samanto et al., (2022) yang dilakukan pada sektor swasta bidang perhotelan dengan hasil menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini terjadi dua hal. Pertama, Perusahaan tidak dapat mendeteksi resiko yang akan terjadi di masa depan, sehingga pengendalian internal perusahaan tidak berjalan

dengan baik. Pengendalian internal yang tidak baik berakibat pada pencegahan *fraud* yang juga tidak berjalan dengan baik. Kedua kurangnya kesadaran para karyawan terhadap peraturan dan masalah yang timbul pada perusahaan. Karyawan tidak sepenuhnya berpartisipasi pada bidang lain sehingga terjadi sikap acuh terhadap permasalahan perusahaan. Karyawan lebih menganggap permasalahan perusahaan menjadi tanggung jawab atasan sepenuhnya, bukan masalah bersama. Padahal seharusnya setiap karyawan pada departemen harus saling peduli dan bisa bekerjasama dalam tim, karena organisasi memiliki kesinambungan anatara satu dengan lain, sehingga ketika terdapat bagian organisasi yang mengalami masalah dalam pengendalian internal, maka akan berpengaruh terhadap bagian lainnya.

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian Pratopo et al., (2023) pada sektor perbankan yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dikarenakan adanya peluang tidak menjadi dorongan yang memicu terjadinya penipuan dalam sistem pengendalian internal. Peluang terjadinya *fraud* di industri perbankan selalu ada baik sistem pengendalian internal kuat maupun lemah. Penyebab lain sistem pengendalian internal pada industri perbankan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan karena perusahaan yang kurang mampu mendeteksi risiko yang akan terjadi kedepan dan kurangnya kesadaran para karyawan terhadap peraturan dan masalah yang timbul di perusahaan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan *accounting fraud*. Hal ini dapat dilihat dari penilaian responden yang memberikan nilai lebih rendah pada pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan ketersediaan panduan, pedoman, atau Standar Operasional Prosedur yang jelas untuk semua jenis pekerjaan. Belum tersedianya panduan, pedoman, atau Standar Operasional Prosedur pada sebuah organisasi menjadikannya rentan terhadap kesalahan dan *fraud*, terutama dalam proses-proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu juga penilaian pada pertanyaan yang berhubungan dengan pemantauan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kegiatan yang dilakukan staf.

Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Penurunan *Accounting Fraud*

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Fadhilah (2021) dan Sari et al., (2020) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan *fraud*. Meskipun dalam konsep penelitian Adwitya et al., (2021) dinyatakan bahwa aturan akuntansi dapat mencegah dan mengurangi kecurangan akuntansi, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada UPK di Kabupaten Sragen. Untuk kondisi pada UPK di Kabupaten Sragen, tingkat ketaatan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penurunan *accounting fraud*.

Penelitian yang memiliki hasil sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan oleh Firdausy et al., (2022) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan *accounting fraud*. Hal ini dikarenakan pembuat laporan keuangan belum sepenuhnya menempatkan kepentingan pengguna laporan keuangan sebagai skala prioritasnya, tetapi masih terdapat kepentingan golongan di dalamnya. Selain itu, penyebab tidak berpengaruhnya ketaatan aturan akuntansi terhadap *accounting fraud* terkait dengan penanggungjawab terkadang mengungkapkan laporan keuangan yang kurang memadai dan ada yang ditutup-tutupi.

Selain itu, Nurhayati, et al., (2022) juga telah melakukan penelitian pada sektor swasta dalam hal ini perusahaan ritel yang memberikan hasil bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh pada kecenderungan *accounting fraud*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan telah mematuhi aturan akuntansi yang berlaku, sehingga dalam analisisnya disebutkan bahwa ketaatan aturan akuntansi dalam perusahaan ritel tidak mempengaruhi tingkat kecenderungan *accounting fraud*. Kecenderungan *accounting fraud* terjadi bukan karena ketaatan aturan akuntansi yang menurun, melainkan terjadi karena kondisi tertentu yang tidak di uji dalam penelitiannya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketaatan akuntansi yang belum memberikan pengaruh pada penurunan *accounting fraud* ini dapat dilihat dari masih rendahnya penilaian yang diberikan oleh responden pada pertanyaan penelitian yang terkait dengan posisi penanggung jawab penyusun laporan keuangan di UPK yang harus berusaha membebaskan diri dari berbagai pengaruh kepentingan tertentu dari pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan akuntansi. Padahal, kemampuan penanggung jawab laporan keuangan UPK untuk membebaskan diri dari pengaruh kepentingan tertentu adalah syarat utama menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan yang mampu mendukung penurunan *accounting fraud*.

Ketaatan akuntansi yang tidak berpengaruh secara signifikan pada penurunan *accounting fraud* pada penelitian ini juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah keberadaan UPK yang merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MPd). Transparansi pada pengelolaan program pemberdayaan masyarakat ini masih bersifat tradisional dimana pelaporan keuangan cenderung hanya mengedepankan pencatatan dan belum dilakukan secara profesional. Dengan demikian ketaatan akuntansi belum diterapkan secara penuh pada UPK sehingga belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam penurunan *accounting fraud*.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penurunan *Accounting Fraud*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap variabel penurunan *accounting fraud*. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap variabel penurunan *accounting fraud* pada UPK di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Cris et al., (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Selain itu, hasil

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Saputra et al., (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang meliputi peran keterampilan interpersonal memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan organisasi dalam upaya menciptakan keunggulan dan mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang memberikan pengaruh yang signifikan pada penurunan *accounting fraud*. Hal ini dapat dilihat dari penilaian responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia. Pertanyaan tersebut antara lain meliputi pemahaman tentang transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dalam melaksanakan tugas, pemahaman dalam melaksanakan kode etik, pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP), kemampuan mengerjakan tugas secara tepat waktu, dan dapat memprioritaskan tugas dinas daripada kepentingan pribadi/keluarga jika dihadapkan pada waktu yang sama. Pada pertanyaan ini, hampir seluruh responden memberikan penilaian yang tinggi.

Kepemilikan kompetensi sumber daya manusia pada UPK tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pendidikan responden. Adapun jenjang pendidikan responden sebagian besar Diploma Tiga (D3) sampai dengan Pascasarjana (S2) sebanyak 70,9 %. Jenjang pendidikan ini merupakan jenjang pendidikan tinggi yang telah membentuk kompetensi sumber daya manusia pada UPK di Kabupaten Sragen, sehingga pengurus UPK mampu berperan dalam penurunan *accounting fraud*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud*, ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud*, karena memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,064 dan 0,179 ($> 0,05$). Sebaliknya, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan *accounting fraud* dengan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Dengan demikian, hanya hipotesis H_3 yang diterima, sementara H_1 dan H_2 ditolak. Penelitian memiliki keterbatasan, antara lain hanya menguji tiga variabel independen tanpa memasukkan variabel kontrol, moderasi, atau intervensi seperti gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Sragen dengan data primer dari kuesioner pengurus UPK saja, sehingga kurang dapat digeneralisasi dan objektivitas data perlu ditingkatkan dengan metode tambahan seperti wawancara. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain atau menggunakan teknik analisis lebih kompleks seperti SEM. Saran lain dari hasil penelitian ini untuk pemerintah pusat serta Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan sosialisasi dan penerapan ketaatan aturan akuntansi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MPd) guna menurunkan *accounting fraud* secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2019). Survei Fraud Indonesia. *ACFE Association of Certified Fraud Examiners*.
- Adelin, & Fauzihardani. (2013). *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis*. 1(2).
- Adwitya, & Sari. (2020). Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dipemerintahan Kota Payakumbuh. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.
- Animah, Suryantara, & Astuti. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sitem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAA (Jurnal Aplikasi Akuntansi)*, 5.
- Antarnews.com. (2023, July 4). *Penyidik Kejari Lombok Timur Memeriksa 35 Saksi Kasus Korupsi DAPM*. Mataram.Antarnews.Com.
- COSO. (1992). *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*. COSO.ORG.
- Detik.com. (2023, June 4). *Kejari Tabanan “Pamer” Tumpukan Uang Rp 1,92 Miliar Kasus Korupsi DAPM* . Detikbali.Com.
- Eisenhardt. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*.
- Fadhilah, Abdullah, & Suhartono. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Moderating. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2 Nomor 2 Tahun 2021.
- Fadilah, Abdulah, & Suhartono. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Akuntanasi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Moderating. *ISAFIR: Islamic Accounting And Finance Review*.
- Fidausy, R.C. & Sari R.P. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halimatusyadiah, & Robani. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Harseno, Susilowati, & Mahmudah. (2020). Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) EKS Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

- (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal .
Diponegoro Law Jurnal.
- Hero Priono. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada BPKAD. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Isdiyanto. (2022). Kebijakan Hukum Dalam Menyelesaikan Problem Dana Bergulir EKS PNPM Mandiri Pedesaan. *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*.
- Ismuadi & Saputra. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*.
- Jamaluddin, & Enre. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *POINT Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*.
- Jawapos.com. (2023, June 1). *Tersangka Kasus Korupsi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Bertambah Satu*. Radarmadiun.Jawapos.Com.
- Jensen et al. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Jubaedah. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah . *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Judijanto, Sudarmanto, & Triyantoro. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*.
- Karyadi, & Muh. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2).
- Kuntadi, Elisabeth, & Limbong. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Fraud: Sistem Pengendalian Internal, Audit Investigatif, Skeptisme Profesional. *Journal of Comprehensive Science*, 1.
- Kuntadi, puspita, & Taufik. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan : Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi)*, 3(5).
- Kurniawan. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pada PD.BPR/BKK Di kabupaten Sragen*.
- Laoli. (2022). Pengaruh Ketaatan Aturan akuntansi, Asimetri Informasi, Eektivitas Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Kantor Cabang BRI

Gunungsitoli). *Jurnal EBISTEK (Ekonomi Bisnis Dan Teknologi)*, Volume 3(Issue 1).

Mahyuddin. (2008). Kapabilitas Organisasi Publik. *Jurnal Ilmiah*.

Maolani, Nuraeni, Dellyani, & Huda. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*.

Mulyani. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal BanqueSyar'i*, 4.

Norsain. (2014). Peranan Audit Internal Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan(Fraud) studi kasus pada PNPM mandiri perkotaan kecamatan kalianget. *Jurnal Performance Bisnis Dan Akuntansi*.

Nurhayati, E., Nuroh, R.T., & Puspasari, O.R. (2022). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan Ritel Di Kabupaten Kuningan). *JRKA*. 8 (1)

Nuryadi, Astuti, Utami, & Budiantara. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (Gramasurya, Ed.; Gramasurya). Sibuku Media.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) (2008).

Pramesti, & Wulanditya. (2021). Studi Eksperimen: Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *AKUNESA: JurnalAkuntansiUnesa*, 9(3).

Pratiwi, Kusuma, & Prakoso. (2023). Implementasi Progam Dana amanah Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara . *Jurnal Administrasi Publik*.

Purnama. (2023). Analisis Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal STISIP*.

Puspasari, N.L. & Putra, C.G.B. (2022). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Payangan), *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*.

Putri, Irawan, & Widyastuti. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan. *Review Of Applied Accounting Research*.

- Rosidah, Kesumah, & Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2.
- Rosidah, Kesumah, Rizka, & Gunardi. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Di instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*.
- Ross. (1973). The Economic Theory of agency: The Principal's Problem. *The American Economic Review*.
- Ruhiyat, L. Ermawati. L, & Supaijo. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Gender Terhadap Pencegahan *Fraud Accounting* Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Way Tenong). *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, 6 (3).
- Sabili, Romansya, & Hidayat. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid(studi kasus masjid jogokariyan yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*.
- Samanto, H., Pravasanti, Y. A., & Saputra, S. A. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22 (2).
- Sari, Yuniarta, & Julianto. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal , Penegakan Peraturan, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) (Studi Kasus: Pada BUMD Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*.
- Siti Nur Rohmah. (2012). Analisis Kinerja Unit Pengelola kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Di Kabupaten Sragen :Perbandingan Analisis Rasio Dan Data Envelopmen Analysis. *digilib.uns.ac.id*.
- Kundoyo & Lailatul. A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8 (12)
- Ulrich, & Lake. (1990). Organizational capability: Competing from the inside out. *Human Resource Manajemen*.